

Kepemimpinan Perempuan dalam Konstruksi Berpikir Presiden Tiga Negara

Syaiful Amin¹, Ganda Febri Kurniawan², Andy Suryadi³

¹Universitas Sebelas Maret

^{2,3}Universitas Negeri Semarang

syaifulamin@student.uns.ac.id

Article History

received 1/9/2021

revised 1/10/2021

accepted 1/11/2021

Abstract

This study aims to investigate the thought construction of the leaders of three countries, namely Indonesia, the United States and Russia about women's leadership. This research was done by descriptive method. The data for this study was obtained from the official tweets of the presidents of three countries on Twitter. The keywords in the data search were: leadership, women, politics, human rights, and justice. Data analysis was carried out with the Nvivo 12 Pro. The results show that Joe Biden has a stronger thinking construct about women's state leadership with as many as 51, discussed by Joko Widodo in the second position with as many as 49 and Vladimir Putin in the last position with as many as 25. This also answers the thesis that with a liberal democratic system more open to women's leadership compared to the Pancasila democratic system and socialist democracy.

Keywords: *leadership, women, thinking construction, president*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi konstruksi berpikir pemimpin tiga negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia tentang kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dikerjakan dengan metode deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari cuitan resmi presiden tiga negara di Twitter. Kata kunci dalam pencarian data adalah: kepemimpinan, perempuan, politik, hak asasi, dan keadilan. Analisis data dilakukan dengan Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Joe Biden memiliki konstruksi berpikir lebih kuat tentang kepemimpinan perempuan dengan cuitan sebanyak 51, disusul oleh Joko Widodo di posisi kedua dengan cuitan sebanyak 49 dan Vladimir Putin di posisi terakhir dengan cuitan sebanyak 25. Hal ini sekaligus menjawab tesis bahwa negara dengan sistem demokrasi liberal lebih terbuka terhadap kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan negara dengan sistem demokrasi Pancasila dan demokrasi sosialis.

Kata kunci: *kepemimpinan, perempuan, konstruksi berpikir, presiden*

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series

<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284

e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Setelah Taliban berkuasa kembali di Afghanistan sejak 15 Agustus 2021, diskusi tentang masa depan politik perempuan mencuat kembali ke permukaan (Ibrahim 2021). Meskipun Zabihullah Mujahid sebagai juru bicara Taliban dalam konferensi pertamanya pasca berkuasa pernah mengatakan akan menunjukkan pemerintahan kepada dunia (terbuka), tidak bersembunyi; kemudian Taliban menjamin tidak akan ada kekerasan dalam memimpin dan akan berlaku adil kepada perempuan, menjamin hak-haknya seperti akses pendidikan dan pekerjaan. Itu merupakan respon Taliban atas kekhawatiran yang semakin tak terkendali dan citranya yang lekat dengan kekerasan (Sicca 2021).

Banyak kalangan yang skeptis terhadap janji-janji Taliban. Dan sebulan kekuasaan berlangsung, kenyataannya Taliban justru menerapkan kebijakan yang meminggirkan perempuan. Beberapa di antaranya adalah, segregasi gender di dalam kelas bagi pelajar, bagi pengajar perempuan diwajibkan mengenakan hijab, begitu juga bagi pekerja perempuan. Bukan sekadar menutupi kepala, tetapi harus mengenakan abaya hitam ke seluruh tubuh, menutupi muka dan tangan (Isa 2021). Hal ini adalah bentuk penegakan syariat Islam di Afghanistan, Taliban seolah tidak percaya dengan kemampuan perempuan dan konsep kesetaraan yang menjadi ciri khas masyarakat modern (Verma 2021; Rieber-Mohn and Tripathi 2021).

Fenomena di atas tentu saja menggugah masyarakat dunia untuk mempertanyakan kembali, eksistensi perempuan dalam kepemimpinan. Eagly dan Carli mengemukakan dua kesimpulan tentang kaitannya gender dan kepemimpinan: *Pertama*, menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan di antara keduanya. *Kedua*, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih *democratic*, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat *directive* (menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah) (Eagly and Carli 2018). Kegagalan Taliban dalam memahami keberadaan dan koeksistensi perempuan menjadikan dunia mulai mencurigai bahwa dominasi patriarkis dan ideologi negara yang diusung oleh Taliban adalah cermin resistensi paling nyata yang membedakan antara negara modern dengan negara tradisional.

Dari isu di atas, muncul pertanyaan mendasar, apakah persoalan koeksistensi perempuan ini hanya terjadi di Afghanistan di bawah Taliban? Apakah negara dengan sistem demokrasi memiliki kecenderungan lebih menerima kepemimpinan perempuan? Dua pertanyaan ini menjadikan diskusi mengenai kepemimpinan perempuan di negara-negara demokrasi lebih hidup. Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan sendiri memiliki kecenderungan dan gaya memimpin yang berbeda (Klenke 2017). Hal itulah yang seringkali menjadikan alasan sebagian kalangan tidak menerima keberadaan perempuan lebih dari apa yang mereka yakini, meskipun sejarah bangsa-bangsa mengajarkan bahwa peranan perempuan dalam politik seringkali menjadikan kehidupan lebih dinamis.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi konstruksi berpikir pemimpin tiga negara dari tiga benua dengan sistem demokrasi dan ideologinya masing-masing, yaitu Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Rusia. Penelitian akan memotret bagaimana pemimpin-pemimpin tersebut menunjukkan sikap pro terhadap koeksistensi perempuan di berbagai bidang melalui aktivitas yang mereka tunjukkan di media sosial, sehingga penelitian ini diproyeksi akan memberikan kontribusi pada pemahaman publik tentang kondisi dan masa depan kepemimpinan perempuan di negara demokrasi.

TEORI DAN METODE

Untuk menganalisis bagaimana presiden tiga negara berpikir tentang kepemimpinan perempuan, maka digunakan teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud (Freud 1925). Teori ini memungkinkan peneliti memahami alam pikiran dari seseorang dari ekspresi kebahasaan yang dimunculkan melalui media. Psikoanalisis Freud menekankan pemahaman kritis pada objek, untuk mengetahui secara dalam kesadaran seseorang tentang sebuah pembahasan (Bertens 2006). Identitas, ego dan superego adalah tiga bagian dari aparatus psikis didefinisikan dalam model struktur jiwa. Identitas menurut Freud adalah karakter yang tercermin ke dalam ekspresi seseorang (Freud 1916). Ego adalah bagian dari identitas yang manusia bangun sendiri. Semua keyakinan yang dipegang teguh seputar prinsip, aspek kepribadian, bakat, hingga keterampilan dan/atau kemampuan turut membangun ego (Richter, Lieberman, and Kramer 2012). Itu sebabnya ego seringkali dikaitkan dengan rasa percaya diri atau harga diri. Sedangkan superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua, dan lingkungan (Bakan 2012). Pada dasarnya Superego adalah hati nurani, jadi Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah. Dalam ketiga kerangka itulah peneliti bekerja menganalisis sejauh mana para presiden tiga negara mengonstruksi pemahamannya tentang koeksistensi dan kepemimpinan perempuan.

Penelitian ini adalah proyek kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif (Creswell and Poth 2016). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan spesifik. Fokus penelitian ini adalah konstruksi berpikir yang dapat dianalisa dengan pendekatan psikoanalisis para tokoh tentang isu perempuan. Dalam penelitian ini peneliti mengandalkan data primer, berupa cuitan langsung tentang kepemimpinan perempuan dan aspek-aspek yang melingkupinya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden (@JoeBiden) dengan pengikut 31.200.000, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (@jokowi) dengan pengikut 16.000.000 dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin (@KremlinRussia_E) dengan pengikut 968.400.

Data diperoleh dengan cara mengoperasikan NCaptur yang merupakan fitur dari NVivo 12 Pro untuk mengubah cuitan sebagai objek penelitian menjadi data set yang dapat dianalisis. Data set ini adalah data mentah yang telah siap untuk dianalisis. Analisis dilakukan dengan software NVivo 12 Pro yang merupakan alat bantu dalam analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengandalkan menu *text analysis* dan *word count*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Twitter menjadi salah satu media politik bagi para pemimpin dunia yang sangat populer dan berpengaruh. Seringkali pembahasan mengenai isu-isu penting dilakukan pada platform tersebut. Melalui aktivitas akun Twitter para Presiden di beberapa negara, seperti Amerika, Indonesia dan Rusia, dapat diketahui perkembangan kehidupan politik dalam dan luar negeri di negara tersebut. Bahkan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana para pemimpin dari tiga negara tersebut dapat mengungkapkan pemahamannya tentang suatu isu juga dapat dianalisis. Pada bagian ini akan dipaparkan informasi tentang konstruksi berpikir presiden tiga negara tentang kepemimpinan perempuan yang sepenuhnya diperoleh melalui Twitter. Selain itu data profil presiden tiga negara juga akan dipaparkan sebagai pengetahuan awal.

A. Profil Joe Biden

Dilahirkan di Pennsylvania pada 20 November 1942, Joe Biden sempat bekerja sebagai pengacara sebelum berkarir di politik. Ia tumbuh menjadi senator Amerika Serikat (AS) termuda kelima di masa lalu di samping senator terlama di Delaware.

Kampanye kepresidenannya di tahun 2008 sama sekali tidak mendapatkan momentum, namun calon dari Partai Demokrat Barack Obama memilihnya sebagai pasangan, dan Biden menjadi wakil presiden ke-47 Amerika. Pada 2017, pada penutupan pemerintahannya, Obama memperkenalkan Biden dengan *Presidential Medal of Freedom*. Dua tahun kemudian Biden meluncurkan kampanye untuk presiden AS pada tahun 2020 (Duru et al. 2021).

Setelah lulus dari fakultas regulasi pada tahun 1968, Biden pindah ke Wilmington, Delaware, untuk mulai bekerja ke arah badan regulasi. Ia juga tumbuh menjadi anggota dari Pertemuan Demokrasi bersama, dan pada tahun 1970 ia terpilih menjadi anggota Dewan Daerah Benteng Baru.

Pada tahun 1972, *Delaware Democratic Get together* menginspirasi Biden yang berusia 29 tahun untuk mencalonkan diri sebagai oposisi terhadap petahana Republik J. J. Caleb Boggs untuk Senat Amerika. Meskipun sedikit yang mengira ia memiliki kemungkinan besar, Biden menjalankan kampanye tanpa lelah yang sebagian besar diorganisir oleh anggota keluarga. Kakak perempuannya, Valerie Biden Owens, membantu sebagai pengawas kampanyenya, dan masing-masing ibu dan ayahnya berkampanye setiap hari. November itu, dalam kompetisi dengan jumlah pemilih yang besar, Biden memperoleh kemenangan besar untuk menjadi senator AS termuda kelima yang terpilih dalam sejarah negara itu (Griebie and Immelman 2021).

Dari tahun 1973 hingga 2009, Biden menjadi Senator terkemuka. Selama masa jabatannya di Senat, Biden mendapatkan penghormatan sebagai salah satu dari banyak konsultan luar negeri, yang menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri selama beberapa tahun. Banyak posisi peliputannya di luar negeri termasuk mengadvokasi pembatasan senjata strategis dengan Uni Soviet, mengkampanyekan perdamaian dan stabilitas di Balkan, meningkatkan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) untuk memasukkan negara-negara bekas blok Soviet dan menentang Konflik Teluk Pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, ia dikenal sebagai penggerak untuk menyelesaikan genosida di Darfur dan berbicara menentang Presiden George W. Bush tentang Konflik Irak (Waisanen and Becker 2015).

Pada 2007, dua puluh tahun setelah tawaran presiden pertamanya yang gagal, Biden segera memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden AS. Terlepas dari keahliannya selama bertahun-tahun di Senat, kampanye Biden tidak menghasilkan banyak momentum di bidang yang didominasi oleh Hillary Clinton dan Barack Obama. Biden keluar setelah menerima lebih dari satu persen suara dalam kaukus Iowa yang penting.

Namun, beberapa bulan kemudian, Obama, setelah mendapatkan nominasi Demokrat setelah kampanye yang keras melawan Clinton, memilih Biden sebagai pasangan. Seiring dengan akar kelas pekerja, Biden membantu kampanye Obama berbicara pesan pemulihan keuangan kepada pemilih kerah biru yang penting untuk menarik negara-negara seperti Ohio dan Pennsylvania. Pada 2 November 2008, Barack Obama dan Joe Biden dengan meyakinkan mengalahkan tiket Partai Republik Senator Arizona John McCain dan Gubernur Alaska Sarah Palin. Pada 20 Januari 2009, Obama dilantik sebagai presiden AS ke-44 dan Biden menjadi wakil presiden ke-47 (Immelman 2019).

Biden bertugas dalam fungsi penasihat di belakang layar untuk presiden, ia mengambil peran penting secara signifikan dalam merumuskan kebijakan asuransi federal yang mengacu pada Irak dan Afghanistan. Pada tahun 2010, wakil ketua menggunakan koneksi Senatnya yang mapan untuk membantu perjalanan aman dari Perjanjian Diskon Senjata Strategis Baru antara Amerika dan Federasi Rusia. Kiprah yang sangat berpengaruh Biden dalam hubungan internasional Amerika menjadikannya calon kuat kandidasi presiden Amerika tahun 2020. Ia memilih Kamala Harris sebagai wakil, mengingat Harris juga cukup mapan secara politik dan

popularitasnya cukup besar di kalangan akar rumput Amerika di negara-negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik.

Popularitas Joe Biden – Kamala Harris semakin menanjak menjelang pemilihan presiden khususnya pada wilayah kantong-kantong suara yang dikuasai oleh partai Republik. Pada bulan November 2020, Pemilihan presiden Amerika dilakukan. Hasilnya, Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2020. Suara elektoral yang dikumpulkan oleh Joe Biden sebesar 290 mengalahkan Donald Trump yang hanya mengumpulkan suara 214. Biden juga berhasil mengumpulkan 72 juta suara yang menjadi rekor dalam Pilpres Amerika Serikat. Dengan demikian Joe Biden keluar sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia dilantik pada bulan Januari 2021 bersama dengan Kamala Harris yang menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih.

B. Profil Joko Widodo

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, dari pasangan Noto Miharjo dan Sujatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari empat bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari (Bramasta 2021).

Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatnya dari ayahnya yaitu Noto Miharjo yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran, ketika rumahnya tiga kali terkena penggusuran. Setelah lulus Sekolah Dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Disana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya serta pemanfaatannya.

Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985 Jokowi akhirnya menikahi pujaannya, Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di Kota Solo yang kemudian memberinya tiga orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kraft Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya.

Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya, di CV Roda Jati, Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV. Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming (Bramasta 2021).

Bisnis kayu Jokowi dibawah naungan CV. Rakabu mengalami pasang surut bahkan hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990 berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel.

Di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon Walikota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi Walikota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai Walikota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya

sebagai Walikota Solo banyak mengubah wajah Kota Solo menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin 'blusukan' yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi Walikota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi Walikota Solo (Lesmana, Nugroho, and Yoanita 2016).

Keberhasilannya memimpin Kota Solo kemudian membuat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk maju ke Kursi Gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi-Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012 (Utami 2013).

Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai Calon Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833 (Istianto 2014).

Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca mejadi Presiden RI, banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian, bagaimana tidak, hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun saja ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Pada bulan Agustus 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Jokowi berpasangan dengan seorang ulama yakni Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2019. Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa Jokowi sekali lagi terpilih menjadi presiden untuk periode 2019-2024.

C. Profil Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober 1952 tepatnya di Saint Petersburg yang saat itu masih dikenal dengan nama Leningrad. Ia adalah anak tunggal, tapi sebenarnya memiliki dua saudara. Namun, mereka meninggal yang pertama saat lahir, kedua karena terkena difteri. Vladimir Vladimirovich Putin pernah duduk di bangku kuliah dalam bidang hukum Universitas Negeri Leningrad. Setelah lulus tahun 1975 ia langsung bekerja di dinas intelijen Uni Soviet serta ditempatkan di Dresden Jerman Timur (Hill and Gaddy 2015).

Vladimir Vladimirovich Putin merupakan anak dari Vladimir Spiridonovich dengan Maria Ivanovna Putina. Ibunya dulu adalah seorang buruh pabrik sedangkan ayahnya bekerja sebagai konskrip dalam Angkatan Laut Soviet pada awal tahun 1930-an. Saat masih kecil, Putin tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen komunal bergaya Uni Soviet. Pada zaman tersebut, hal semacam itu sangatlah biasa saja. Ia juga amat menyukai novel bertema agen rahasia sampai-sampai bertanya cara bergabung ke dalam dinas intelijen (Lynch 2011).

Saat Vladimir Vladimirovich Putin selamat dari kekacauan pada masa transisi Uni Soviet, tepatnya tahun 1991 ia mengundurkan diri dari KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*) dan memilih pulang ke kampung halamannya di Leningrad (Saint Petersburg) (Paxton 2013). Di sana Vladimir Vladimirovich Putin bekerja untuk wali kota pertama yang saat itu dipilih secara demokratis juga sebagai dosennya semasa

kuliah, namanya Anatoly Sobchak. Selama itu, Putin selalu berada di belakang layar tapi ia dikenal mampu menyelesaikan masalah dan dapat diandalkan.

Di tahun 1999 bulan Agustus Yeltsin memilih Vladimir Vladimirovich Putin untuk menjadi seorang perdana menteri Rusia yang termasuk ke dalam jabatan tertinggi kedua Negeri Beruang Merah. Dengan posisi tersebut dapat memudahkan ia dipilih menjadi presiden pada Maret 2000. Tahun 2004 Vladimir Vladimirovich Putin dipilih kembali untuk masa jabatan kedua lalu pada 2008. Dikarenakan sudah dua kali menjadi presiden, ia harus libur terlebih dahulu dari kepengurusannya. Namun, tepatnya 2012 ia memenangkan kembali pemilihan presiden. Saat ini Vladimir Putin menjadi tokoh yang cukup berpengaruh di dunia Internasional. Ia mengusung misi besar untuk menjadikan Rusia kembali disegani sebagaimana ketika Uni Soviet masih berjaya (Sakwa 2007).

D. Presiden Tiga Negara Merepresentasikan Kepemimpinan Perempuan

Pengumpulan data tentang kepemimpinan perempuan dalam konstruksi berpikir presiden tiga negara dilakukan dengan memperhatikan tiga kata kunci utama, yaitu; perempuan (*women*), Kepemimpinan (*Leadership*), Politik (*Politics*), Keadilan (*Justice*), dan Hak Asasi (*Right*). Intensitas para presiden dalam mencuit kelima hal tersebut menjadi tolak ukur utama dalam menganalisis sejauh mana kepemimpinan perempuan menjadi diskursus yang disebarluaskan oleh para pemimpin tersebut.

Tabel 1. Cuitan Presiden Tiga Negara tentang Kepemimpinan Perempuan dan Aspek yang Melingkupinya

No	Nama	Perempuan	Keadilan	Hak Asasi	Kepemimpinan	Politik
1	Joe Biden	51	82	122	76	20
2	Joko Widodo	49	15	36	36	23
3	Vladimir Putin	25	2	3	19	0

Data di atas menunjukkan bagaimana para pemimpin ketiga negara mencuit tema-tema seputar kepemimpinan perempuan. Dalam hal cuitan ini, Joe Biden nampak lebih intensif melakukan cuitan tentang perempuan, menyuarakan keadilan, hak asasi, dan politik. Cuitan itu sangat terkait dengan kondisi perpolitikan Amerika yang nampak dinamis menjelang pemilihan presiden tahun 2020. Di posisi kedua ada Joko Widodo yang secara keseluruhan cuitannya cukup memberi simpati pada perempuan dan potensi kepemimpinan yang dapat mereka lakukan untuk terlibat dalam membangun Indonesia. Secara historis Amerika dan Indonesia cukup terbuka dengan keterlibatan perempuan dalam politik, meskipun Amerika sendiri belum pernah dipimpin oleh presiden perempuan, Indonesia nampak lebih maju karena pernah dipimpin oleh presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri, putri presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Vladimir Putin berada diposisi ketiga terkait dengan cuitan yang pro terhadap perempuan dan kepemimpinan perempuan. Dalam Twitternya Putin lebih banyak menyoroti kondisi politik dan pelaksanaan kebijakan Rusia untuk masyarakat di negara tersebut ataupun untuk dunia internasional. Putin dapat dikatakan tidak terlalu bersimpati dengan kiprah politik perempuan, dan itu bukan suatu tradisi dalam kancah perpolitikan Rusia sejak Uni Soviet. Posisi terendah dalam hal cuitan tentang kepemimpinan perempuan itu menunjukkan posisi dan tradisi politik Rusia modern yang masih mengunggulkan kiprah laki-laki. Hal itu semakin diperkuat dengan wacana menjadikan Putin sebagai presiden seumur hidup.

Berdasarkan data yang diperoleh, tiga cuitan yang paling merepresentasikan koeksistensi perempuan dari presiden tiga negara adalah sebagai berikut:

Cuitan @JoeBiden tentang perempuan dan kesetaraan:

“The United States stands by the commitment we’ve made to evacuate people—and this includes vulnerable Afghans, such as women leaders and journalists,” (24 Agustus 2021).

“This is our moment to root out systemic racism and build a nation true to our founding ideals. A nation where all men and women are not only created equal - but treated equally,” (23 September 2020).

“Once again, we are called to ask ourselves whether justice could be equally applied in America. But what’s clear is that today in America, Black women deserve better,” (25 September 2020).

Cuitan @KremlinRussia_E tentang perempuan:

“#8March: Vladimir Putin’s greetings to Russian women,” (8 Maret 2021).

“The Role of Women in Developing Industrial Regions International Women’s Forum opened today in Novokuznetsk. Greetings from the President,” (1 Maret 2019).

“#Samara: Vladimir Putin has visited the Samara bakery and confectionery complex and met with women entrepreneurs,” (7 Maret 2018).

Cuitan @jokowi tentang perempuan dan kesetaraan:

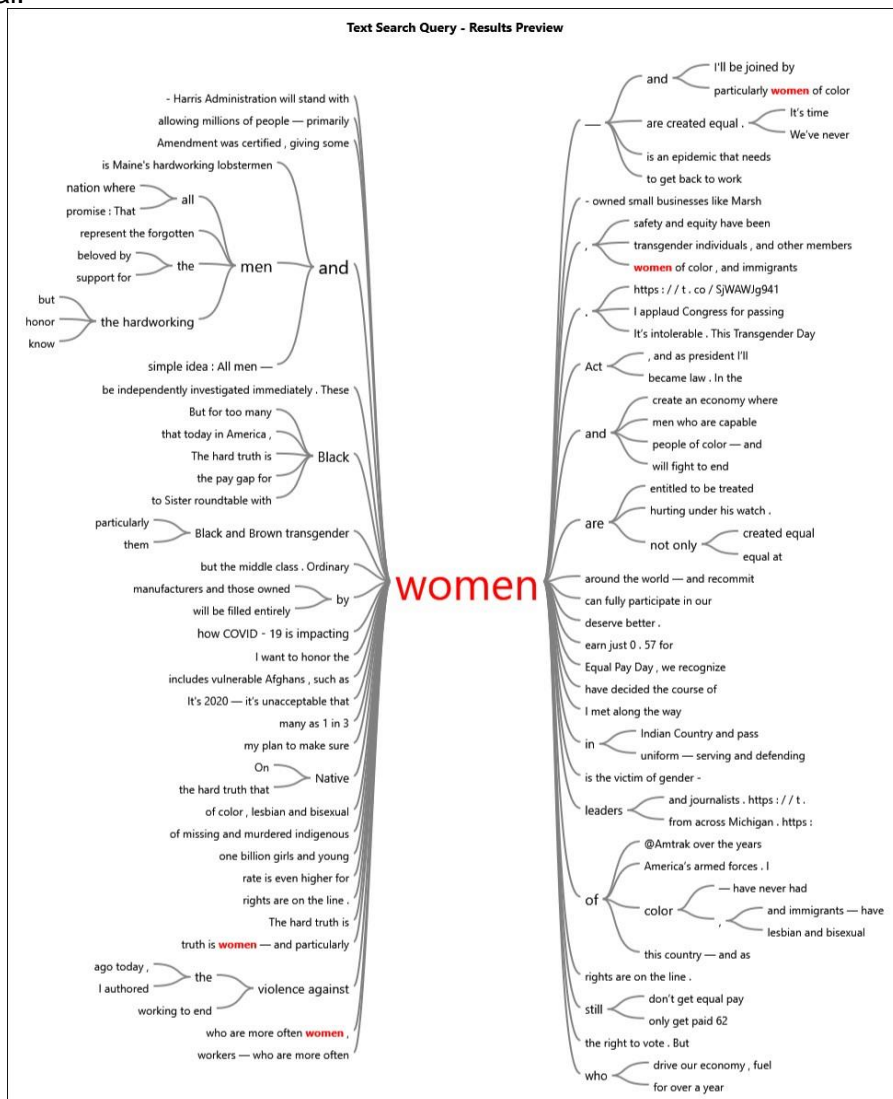
“Di dunia yang kian terbuka dan modern, setiap orang, laki-laki atau perempuan, punya kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Semua setara memberi warna bagi peradaban,” (8 Maret 2021).

“Wajah Indonesia hari ini dan di masa depan, adalah wajah yang turut dibentuk oleh kaum ibu, perempuan-perempuan yang punya akses dan kesempatan yang luas ke seluruh palagan pengabdian kepada bangsa. Perempuan yang berdaya adalah wujud Indonesia yang maju,” (22 Desember 2019).

“Delapan pos menteri Kabinet Kerja diisi oleh perempuan. Dua belas dari 31 medali emas Indonesia di Asian Games 2018 disumbangkan para atlet perempuan. Kita punya banyak tokoh perempuan berprestasi sekaligus yang memberi inspirasi. Jadilah Ibu Bangsa, wahai perempuan Indonesia,” (15 September 2015).

Berdasarkan karakteristik cuitan, dapat diamati bahwa Joe Biden progresif dan tanggap terhadap isu-isu perempuan di dunia, khususnya yang menyangkut kesetaraan dan hak-hak perempuan, tidak segan Biden mengungkapkan ekspresi yang keras dengan pemilihan kata yang lebih terbuka dalam cuitan-cuitannya. Ia ingin dipandang sebagai pemimpin yang pro terhadap kesetaraan dan menerima co-eksistensi perempuan sebagai pemimpin. Berbeda dengan itu, menemukan cuitan Vladimir Putin yang bernuansa perempuan khususnya dalam konteks kesetaraan dan perjuangan penegakan hak lebih sulit, sikap dan ekspresi Putin terkait isu perempuan terbatas pada hal-hal formal seperti memberikan selamat atas pencapaian atlet perempuan, ucapan selamat merayakan hari perempuan, dan ucapan selamat atas dilaksanakannya forum perempuan tanpa menyebutkan esensi dari agenda yang diadakan. Gaya Putin dalam menyampaikan informasi khas seorang intelijen yang serba hati-hati dan tidak membuka semua apa yang dirasakan melalui ekspresi seponatan. Berbeda lagi dengan Jokowi yang mengekspresikan isu-isu perempuan dengan cukup terbuka tetapi terkadang pemilihan katanya masih sangat formal, tetapi menariknya dari apa yang disampaikan Jokowi seputar perempuan dan kesetaraan selalu bermakna idealis dan terkesan penuh basa-basi khas orang Jawa. Gaya bahasa Jokowi dalam berkomunikasi bisa dibilang berbelit dan kurang realistis, mungkin pemahaman terkait kondisi perempuan di lapangan yang kurang memadai, atau juga bisa disebabkan oleh gaya kepemimpinan lama yang terlalu berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pernyataan.

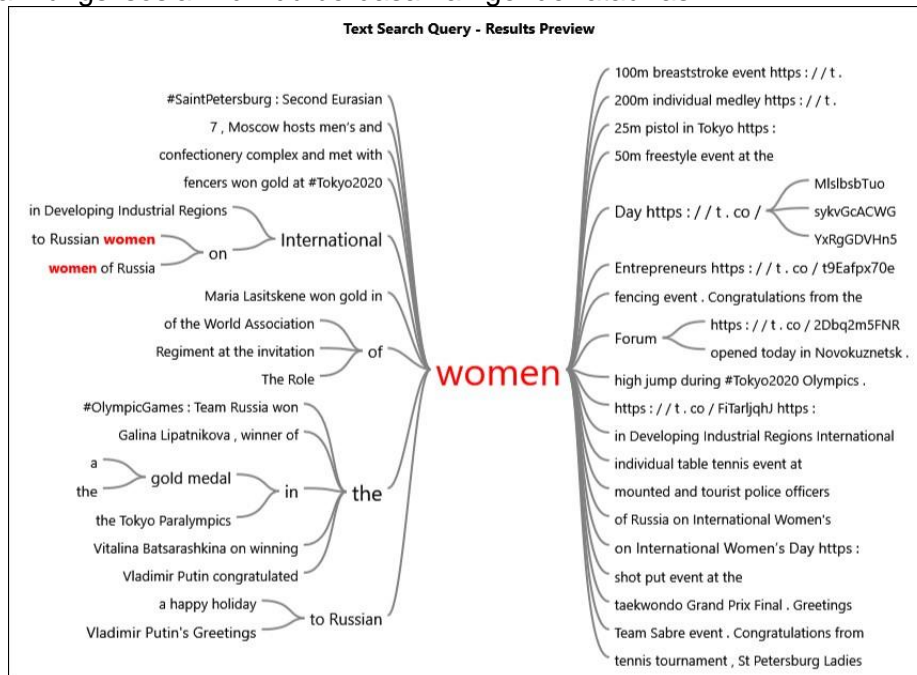
Ketiga pemimpin itu secara ekspresi kebahasaan mencerminkan karakter kepemimpinan yang unik, dan yang paling menonjol adalah Biden. Dari pernyataannya, yang penting untuk digarisbawahi adalah bagaimana sikap Biden tentang isu di negara lain cukup keras yang mencerminkan sikap negara superpower, dari ekspresinya dapat dibaca bahwa pengaruh Amerika masih sangat kuat di dunia Internasional. Misalnya dalam memberi tanggapan atas berkuasanya Taliban dan masa depan kesetaraan gender di negara itu, Biden tegas dan sangat berwibawa untuk mengungkapkan sikap Amerika tentang nasib anak-anak dan perempuan Afghanistan di bawah Taliban. Jika bukan negara superpower dan punya pengaruh hal itu akan sulit direalisasi, di samping itu khas tokoh liberalis, Biden tidak segan menyerang pemerintahan Taliban yang selama 25 tahun terakhir memang bermusuhan dengan Amerika, dari sikap itu kadangkala Biden cenderung arogan dengan kondisi dalam negeri negara lain, hal yang tidak seharusnya ditunjukkan secara terang-terangan, karena dapat menimbulkan sentimen negatif di dalam pergaulan internasional.



Gambar 1. Pohon Kata (*Word Tree*) Joe Biden bermuatan Isu Perempuan

Dari pohon kata yang disusun berdasarkan analisis NVivo 12 Pro pada Twitter Joe Biden dapat dipahami perhatian Biden pada isu-isu perempuan sangat kompleks. Dalam pohon kata itu pemahaman yang muncul dan cukup dominan terkait dengan isu

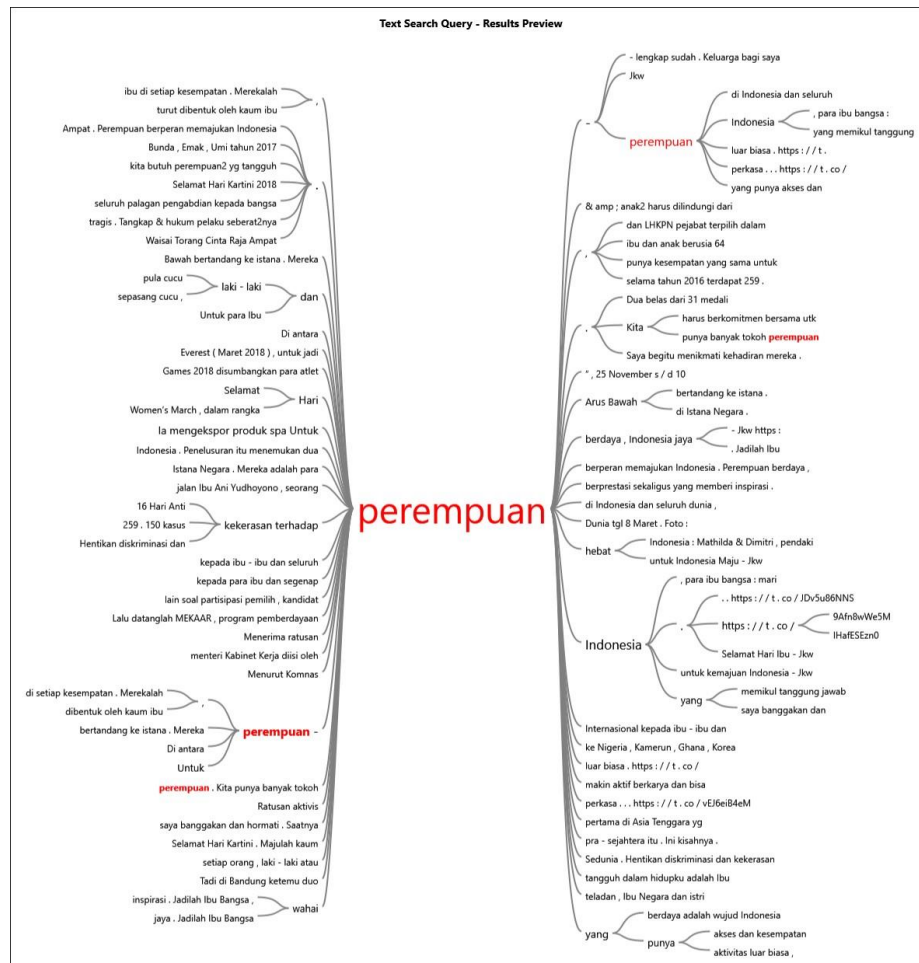
keadilan, hak asasi, kepemimpinan, dan politik. Biden juga sering membuat seruan untuk mendorong timbulnya kesetaraan di masyarakat, tidak membedakan peranan dan fungsi sosial individu berdasarkan gender atau ras.



Gambar 2. Pohon Kata (*Word Tree*) Vladimir Putin bermuatan Isu Perempuan

Dari pohon kata yang disusun berdasarkan analisis NVivo 12 Pro pada Twitter Vladimir Putin diketahui bahwa perspektif Putin terhadap perempuan sangat terbatas, bahkan ada kecenderungan kurang simpatik. Putin lebih banyak memperhatikan kiprah perempuan di bidang olah raga dan entrepreneur, selebihnya Putin secara formal menghormati hari-hari yang berkaitan dengan perempuan seperti International Women’s Day. Bahkan, hampir setiap tahun Putin memperingati hari tersebut. Tetapi sayangnya tidak ditemukan perhatian Putin melalui cuitan terhadap isu perempuan yang bertaut dengan aspek keadilan, hak asasi, kepemimpinan, dan politik. Ini menunjukkan jika Putin mempertahankan karakter pemimpin sosialis yang jarang mengekspos kiprah perempuan di bidang politik. Hal itu juga yang membuat pohon kata Putin tentang perempuan nampak ramping, dan tidak sekompleks pohon kata milik Joe Biden.

Peneliti menduga dengan kuat bahwa kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi, liberalisme yang menjadi gagasan utama masyarakat Amerika telah melahirkan pemimpin yang terbuka, progresif, pro kesetaraan gender dan ekspresif terhadap isu-isu perempuan, sedangkan ideologi sosialis yang dianut oleh masyarakat Rusia melahirkan pemimpin yang cenderung tertutup, berhati-hati, formalistis, dan kurang ekspresif dalam berkomunikasi. Pemimpin di negara sosialis cenderung lebih “dingin” dalam menyikapi isu-isu yang sedang berkembang, seperti isu perempuan.



Gambar 3. Pohon Kata (Word Tree) Jokowi bermuatan Isu Perempuan

Dari pohon kata yang disusun berdasarkan analisis NVivo 12 Pro tentang Twitter Jokowi dapat diketahui bahwa isu perempuan sering diangkat oleh Jokowi, dari masalah keadilan, hak asasi, politik, dan kepemimpinan. Ada kesan Jokowi ingin menunjukkan bahwa masa depan perempuan Indonesia cukup cerah dan bisa dijadikan pedoman dalam membangun relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Tetapi, Jokowi dalam hal ini jarang memberikan ekspresi yang kritis dan tandas tentang isu perempuan yang sedang berkembang, meskipun pohon kata Jokowi nampak kompleks, di dalamnya lebih berisi kalimat-kalimat formal yang definitif. Sebagai perbandingan, sikap Jokowi berada di tengah-tengah antara Biden dan Putin. Tidak terlalu progresif, tidak terlalu terbuka, cenderung banyak basa-basi dengan idealisme yang coba dijadikan *core of knowledge* dalam setiap cuitannya. Hal ini bukan saja dipengaruhi oleh aspek ideologi, tetapi juga budaya Jawa yang sangat melekat dengan Jokowi itu sendiri, dalam tradisi dikenal istilah *lembah manah* yang nampaknya dipegang teguh dalam kepemimpinan Jokowi, arti kata itu sendiri adalah rendah hati, menerima, dan mengalah.

E. Pembahasan

Wacana tentang kepemimpinan perempuan menjadi tema yang menghidupkan kembali percakapan tentang masa depan dunia yang setara dan minus diskriminasi gender. Masalah yang menyangkat hak perempuan dan keadilan gender selalu berkelindan dengan problem politis di suatu negara (Williams 2011; McCormick 2003). Para pemimpin negara adalah representasi dari pikiran negara dan mencerminkan

keadaan sebuah bangsa (Allison, Goethals, and Kramer 2016). Untuk itu, analisis mengenai suatu hal pada sebuah bangsa dapat dilakukan dengan menganalisis representasi bangsa tersebut. Dalam hal ini, posisi presiden cukup menjanjikan dalam memberi informasi mengenai pikiran sebuah bangsa khususnya yang menyoal isu-isu perempuan. Psikoanalisis terhadap para presiden ini memberikan gambaran konstruksi berpikir yang menjelaskan saling kait-mengait antara ideologi, sistem politik, budaya masyarakat dan tercermin ke dalam gaya kepemimpinan (Freud 1925).

Di sebagian besar negara dunia, seperti di Timur Tengah ataupun Amerika, faktor pikiran bangsa yang membentuk watak kepemimpinan sangat mudah dirasakan, belajar dari pergeseran kekuasaan ke tangan Taliban di Afghanistan, atau kepemimpinan Trump ke Biden, dapat diketahui bahwa setiap era memiliki kultur politiknya sendiri (Beetham 2018), begitu juga dengan sikap suatu bangsa terhadap kaum perempuannya. Tesis yang menyebutkan bahwa setiap negara demokrasi akan menerima dengan terbuka koeksistensi dan kepemimpinan perempuan patut untuk dipertanyakan (Beer 2009). Pasalnya dalam temuan penelitian, tidak semua negara yang mendaku diri sebagai negara demokrasi mampu menunjukkan sikap yang adil terhadap koeksistensi dan kepemimpinan perempuan. Dalam bahasa yang formal, beberapa negara mampu menerima, atau bisa juga disebut kondisi itu hanya bertahan di tataran ide. Namun sayangnya, dalam makna lebih mendasar, hanya negara-negara dengan sistem politik dan ideologi paling mapan yang mampu berpikir sekaligus melakukan dukungan dan penerimaan terhadap koeksistensi dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang.

Amerika Serikat memimpin dalam sikap pro terhadap koeksistensi perempuan. Gaya Biden dalam menyikapi isu-isu perempuan menunjukkan sikap dinamis yang progresif. Sikap ini dapat memperkuat dugaan bahwa liberalisme dalam sistem demokrasi lebih membuka peluang bagi tumbuhnya pikiran-pikiran yang konstruktif tentang masa depan yang setara (Neufeld and Van Schoelandt 2014). Biden dalam cuitan-cuitannya berusaha menunjukkan pada dunia, jika Amerika adalah negara yang ramah dan sebuah entitas dengan wawasan keadilan dan kesetaraan yang mapan. Biden juga ingin menunjukkan kapasitas personalnya sebagai politisi Amerika yang berpengalaman dan layak sebagai *role model* kepemimpinan di negara demokrasi. Sikap yang sama sekali berbeda dengan Vladimir Putin yang cenderung berhati-hati dan kurang terbuka terhadap massa. Putin lebih memilih pasif dalam menyikapi banyak fenomena khususnya di dunia internasional. Dalam psikoanalisis Freud dapat dikatakan bahwa kedua pemimpin ini secara alamiah telah memiliki identitasnya masing-masing yang membentuk ego dan superegonya. Di samping itu, ada faktor ideologi yang juga berpengaruh pada pembentukan ego. Satu hal yang penting diperhatikan adalah cara Putin untuk membuat pernyataan di Twitter khas pemimpin negara sosialis yang tertutup dan seolah tidak mau diketahui lebih jauh oleh publik (Stoneman 2015). Superego Putin dibuat misterius dan membuat orang lain bertanya-tanya karena ideologi sosialisme yang dianutnya dalam menggerakkan roda pemerintahan. Meskipun Rusia adalah negara demokrasi, sosialisme nampaknya masih dominan dalam membentuk citra dan watak pemimpin politik.

Berbeda dari Biden dan Putin, Jokowi berada di tengah-tengah. Sikap Jokowi tentang suatu isu lebih bersifat tanggapan formal yang tidak menunjukkan sikap keterbukaan, dan justru penuh kehati-hatian, meskipun Jokowi mencoba untuk tampil sebagai pemimpin negara demokratis yang selalu memberi informasi kepada rakyatnya. Gaya bahasa Jokowi berciri populis, idealis dan formal (Mietzner 2015). Dalam menyoroti suatu isu, misalnya tentang perempuan dan kesetaraan, Jokowi lebih banyak berbicara ide-ide besar tanpa menyinggung realitas perempuan di Indonesia. Bisa dibilang gaya bahasa ini kurang *on point* dan cenderung berada di zona aman. Jokowi tidak seterbuka Biden, tidak setertutup Putin, dalam beberapa cuitan, Jokowi tampil sebagai pemimpin yang konsisten dengan gaya yang sederhana dengan

bahasa yang idealis, meskipun yang sangat disayangkan adalah sikapnya kadang tidak memberi kepuasan pada massa, selalu tidak memenuhi ekspektasi, karena memang alasan bahasa yang digunakan. Dalam kacamata psikoanalisis, gaya Jokowi menyampaikan sebuah persoalan persis dan khas pemimpin negara dunia ketiga yang ingin menciptakan identitasnya sendiri (Udogu 2008), Pancasila juga cukup dominan membentuk ego Jokowi yang khas, dan superego Jokowi ditampilkan secara sedang. Jokowi segan dalam membuat *judgment* atas sebuah isu, berada di tengah adalah gaya yang konsisten. Ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional. Jokowi menjauhkan dirinya dari konflik dan sentimen negatif dunia internasional, tetapi di sisi lain ia coba terus menyikapi dan terlibat dalam pembahasan isu-isu penting dunia. Sebuah strategi yang unik dan menunjukkan kondisi psikologis seorang pemimpin yang berbeda dari pemimpin lainnya.

Biden, Putin dan Jokowi memiliki ciri yang konsisten dalam menyikapi isu perempuan dan kepemimpinan perempuan. Sesuai dengan gaya kepemimpinan yang nampak, sikap Biden adalah yang paling dominan dan bisa dibilang maju. Jika Biden dan Jokowi lebih fokus pada kiprah perempuan dalam politik dan bidang sosial lainnya, sedangkan Putin lebih berusaha apresiatif pada pencapaian perempuan, khususnya di bidang olahraga, di sisi lain Putin tidak pernah membuat pernyataan atau seruan tentang kesetaraan dan koeksistensi perempuan dalam kehidupan sosial-politik. Berdasarkan fenomena yang terjadi, faktor dominan pembentuk karakter kepemimpinan politik yang terbuka pada koeksistensi dan kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh ideologi dan sistem politik. Sedangkan, budaya masyarakat lebih berpengaruh sebagai faktor yang kurang dominan. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa negara dengan sistem demokrasi liberal lebih memungkinkan tumbuhnya pemahaman dan praktik koeksistensi dan kepemimpinan perempuan (Neufeld and Van Schoelandt 2014), daripada demokrasi Pancasila dan demokrasi sosialis. Paradoks muncul ketika negara dengan sistem yang paling terbuka pada koeksistensi dan kepemimpinan perempuan justru tidak pernah dipimpin oleh presiden perempuan, dari sini muncul skeptisme apakah negara dengan demokrasi liberal hanya berupaya menunjukkan ekspresi ego dan superego eksistensial semata, tanpa benar-benar melaksanakan nilai yang diyakini oleh sebagian besar masyarakatnya, yang artinya identitas politik di masyarakat tersebut sebenarnya tidak valid dan cenderung manipulatif? Atau karena alasan lain, sikap yang membentuk identitas justru bertolak belakang dari kebiasaan politik suatu entitas, yang artinya masyarakat tersebut memiliki kecenderungan hipokrit. Peneliti hanya berusaha menunjukkan, dalam sejarah modern, koeksistensi dan kepemimpinan perempuan tidak bisa digantungkan kepada status quo atau pemimpin berkuasa, melainkan harus dibangun dari bawah, supaya bangunan kepemimpinan yang tumbuh memiliki akar kuat dan basis kesadaran pendukung yang mampu diandalkan untuk memulai sebuah perubahan. Akhirnya, jika terealisasi, maka masa depan koeksistensi dan kepemimpinan perempuan akan semakin cerah dan menjanjikan dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara-bangsa, dengan basis sistem politik dan ideologi apapun.

SIMPULAN

Koeksistensi dan kepemimpinan perempuan pasca Afghanistan dikuasai kembali oleh Taliban menjadi diskusi publik yang menarik. Negara-negara dengan sistem demokrasi melihat secara skeptis upaya Taliban membangun tatanan baru di Afghanistan. Tetapi, apakah negara-negara dengan sistem demokrasi lebih adaptif terhadap koeksistensi dan kepemimpinan perempuan patut dipertanyakan, mengingat selama ini perempuan hanya menjadi pemanis kontestasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan sistem demokrasi cenderung lebih menerima keberadaan perempuan, tetapi masing-masing negara memiliki sikap beragam yang dapat dianalisis melalui ekspresi presiden di negara tersebut. Penelitian dilakukan

pada presiden tiga negara yaitu Amerika, Indonesia dan Rusia. Pemimpin dari negara dengan sistem demokrasi liberal lebih terbuka dan progresif dalam menyikapi isu seputar perempuan, kepemimpinan, keadilan, hak asasi dan politik. Pemimpin negara dengan sistem demokrasi Pancasila cukup terbuka tetapi kurang progresif dalam menyikapi isu-isu tersebut, bahasa yang digunakan oleh pemimpin negara tersebut cenderung formalistis. Pemimpin negara dengan sistem demokrasi sosialis lebih tertutup dan cenderung membatasi ekspresi terhadap isu-isu tersebut. Pada akhirnya negara dengan sistem demokrasi liberal dan Pancasila dapat dikatakan lebih menjanjikan bagi koeksistensi dan kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan negara dengan sistem demokrasi sosialis yang tertutup dan tidak fokus pada masa depan kesetaraan dan persamaan hak berdasarkan gender. Meskipun demikian terdapat paradoks, bahwa sikap pemimpin yang progresif itu tidak berarti kedudukan perempuan secara sosial-politik cenderung bebas, melainkan untuk menjadi presiden, negara dengan demokrasi liberal cenderung belum pernah berhasil, dorongan patriarkis dan skeptisme masih menghantui kehidupan politik di negara dengan sistem politik yang sangat terbuka sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Scott T., George R. Goethals, and Roderick M. Kramer. 2016. *Handbook of Heroism and Heroic Leadership*. Taylor & Francis.
- Bakan, David. 2012. *Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition*. Courier Corporation.
- Beer, Caroline. 2009. "Democracy and Gender Equality." *Studies in Comparative International Development* 44 (3): 212.
- Beetham, David. 2018. *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. John Wiley & Sons.
- Bertens, Kees. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bramasta, Dandy Bayu. 2021. "Profil Presiden Ketujuh RI: Joko Widodo." *Kompas.Com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/160000365/profil-presiden-ketujuh-ri--joko-widodo>.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Duru, N. Jeremi, Sarah Dawkins, Dev Trehan, and Tejas Kotecha. 2021. "Joe Biden: How New US President Will Put His Stamp on Sport after Donald Trump's Term." *SkySports.Com*, 2021. https://digitalcommons.wcl.american.edu/pub_disc_media/214.
- Eagly, Alice H., and Linda L. Carli. 2018. *Women and the Labyrinth of Leadership*. Routledge.
- Freud, Sigmund. 1916. "The History of the Psychoanalytic Movement." *Psychoanalytic Review* 3 (4): 406–54.
- . 1925. *The Origin and Development of Psychoanalysis*. An Outline of Psychoanalysis. Modern Library. <https://doi.org/10.1037/11350-001>.
- Griebie, Anne Marie, and Aubrey Immelman. 2021. "The Personality Profile and Leadership Style of US President Joe Biden." *Collegeville and St. Joseph, MN: St. John's University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics.*, 2021. http://digitalcommons.csbsju.edu/psychology_pubs/130/.
- Hill, Fiona, and Clifford G. Gaddy. 2015. *Mr. Putin: Operative in the Kremlin*. Brookings Institution Press.
- Ibrahim, Farid M. 2021. "Seperti Apa Hak Perempuan Afghanistan Di Bawah Taliban Nantinya?" *Republika.Co.Id*, 2021. <https://republika.co.id/berita/qy4fv2/seperti-apa-hak-perempuan-afghanistan-di-bawah-taliban-nantinya>.

- Immelman, Aubrey. 2019. "The Political Personality of Former US Vice President Joe Biden." *Collegeville and St. Joseph, MN: St. John's University and the College of St. Benedict, Unit for the Study of Personality in Politics.*, 2019.
- Isa, Isa. 2021. "Taliban Larang Perempuan Olahraga Karena Tak Sesuai Islam." *Cnnindonesia.Com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210910151744-113-692570/taliban-larang-perempuan-olahraga-karena-tak-sesuai-islam>.
- Istianto, Bambang. 2014. "Bureaucratic Stagnation Versus the New Hope of the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo." *Journal of US-China Public Administration* 11 (12): 960–72.
- Klenke, Karin. 2017. *Women in Leadership: Contextual Dynamics and Boundaries*. Emerald Group Publishing.
- Lesmana, Fanny, Aylanda Dwi Nugroho, and Desi Yoanita. 2016. "Sosok Presiden Joko Widodo Dalam Pemberitaan Tentang Kabinet Kerja." *Scriptura* 6 (2): 57–63.
- Lynch, Allen. 2011. *Vladimir Putin and Russian Statecraft*. Potomac Books, Inc.
- McCormick, Indra. 2003. "Women as Political Actors in Indonesia's New Order." *Working Papers (Monash University. Centre of Southeast Asian Studies)*, iii.
- Mietzner, Marcus. 2015. *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Honolulu, HI: East-West Center.
- Neufeld, Blain, and Chad Van Schoelandt. 2014. "Political Liberalism, Ethos Justice, and Gender Equality." *Law and Philosophy* 33 (1): 75–104.
- Paxton, John. 2013. *Leaders of Russia and the Soviet Union: From the Romanov Dynasty to Vladimir Putin*. Routledge.
- Richter, Gregory C., E. James Lieberman, and Robert Kramer. 2012. *The Letters of Sigmund Freud and Otto Rank: Inside Psychoanalysis*. JHU Press.
- Rieber-Mohn, Julie Haukland, and Kartikeya Tripathi. 2021. "An Investigation into Microcycles of Violence by the Taliban." *Security Journal* 34 (1): 126–47.
- Sakwa, Richard. 2007. *Putin: Russia's Choice*. Routledge.
- Sicca, Shintaloka Pradita. 2021. "Setelah Kuasai Afghanistan, Taliban Janjikan Untuk Atasi Perubahan Iklim Dan Keamanan Global Bersama." *Kompas.Com*, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/26/155940270/setelah-kuasai-afghanistan-taliban-janjikan-untuk-atasi-perubahan-iklim?page=2>.
- Stoneman, Anna J. 2015. "Socialism with a Human Face: The Leadership and Legacy of the Prague Spring." *The History Teacher* 49 (1): 103–25.
- Udogu, E. Ike. 2008. "The Issue of Political Leadership in the Third World: What Is to Be Done?" *Journal of Third World Studies* 25 (1): 13–23.
- Utami, Sulistyono. 2013. "Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (GCG)." *Liquidity* 2 (2): 160–69.
- Verma, Raj. 2021. "The US-Taliban Peace Deal and India's Strategic Options." *Australian Journal of International Affairs* 75 (1): 10–14.
- Waisanen, Don J., and Amy B. Becker. 2015. "The Problem with Being Joe Biden: Political Comedy and Circulating Personae." *Critical Studies in Media Communication* 32 (4): 256–71.
- Williams, Susan H. 2011. "Democracy, Gender Equality, and Customary Law: Constitutionalizing Internal Cultural Disruption." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18 (1): 65–85.